

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kiai merupakan tokoh masyarakat atau ulama yang menjadi panutan sebagai tempat bertanya serta belajar ilmu agama. keberadaan kiai sangat esensial bagi pesantren maupun masyarakat. Kiai dalam pesantren biasanya sebagai pengelola, pengasuh maupun figur tunggal pemilik suatu pesantren. Menurut Zamakhsari Dhofir, kiai adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang yang ahli agama Islam serta memilik atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik (kuning) kepada santrinya (Paton, 2007, hal. 1-2).

Sebagai sosok yang diberi predikat ahli agama oleh masyarakat, keberadaan kiai laksana seorang pemimpin yang sentral. Idealnya, kiai berperan sebagai *Ulil Amri* dan *Khadimul Ummah*. Sebagai *Ulil Amri*, kiai bertanggungjawab penuh terhadap segala persoalan yang muncul di tengah masyarakat, sehingga harus berusaha bersikap adil untuk melindungi masyarakat, terutama kaum *mustadh'afin*. Sementara sebagai *khadimul ummah*, kiai memiliki orientasi melayani masyarakat berkelindan melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kiai identik dengan pesantren, karena biasanya kiai merupakan pendiri, pimpinan, maupun sosok guru yang mengajar di sebuah pesantren. Tetapi di lain sisi sebutan kiai bisa diberikan atas pengakuan masyarakat kepada sosok tokoh yang dituakan serta memiliki kemampuan dalam ilmu agama Islam.

Dalam dunia islam seorang kiai dikenal sebagai orang yang menjalankan lembaga pendidikan, khususnya di Indonesia lembaga pendidikan itu biasa disebut pesantren. Konsep pesantren adalah pendidikan tradisional. Menurut Nurcholish Madjid, pesantren adalah lembaga yang merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional. Pesantren apabila ditinjau dari historis mengandung makna keislaman dan keaslian Indonesia (indigenous) (Madjid, 1997, hal. 3). Lembaga pendidikan serupa pesantren sebenarnya sudah ada sejak masa Hindu-Buddha, maka Islam tinggal mengislamkan lembaga pendidikan tersebut. Tetapi ini tidak berarti peranan umat Islam kecil dalam lahirnya lembaga pesantren di Indonesia.

Jika menelisik peran kiai dalam pesantren yang diakui memiliki kecakapannya dalam ilmu agama sangat tabu apabila kiai terjun di dunia politik. Tetapi di masa sekarang politik menjadi keharusan yang tidak bisa dipisahkan. Kenyataan tersebut menjadi popularitas yang dulu dianggap tabu, sekarang siapapun berhak turun dalam dunia politik. Tak terkecuali kiai pesantren bisa untuk turun dalam panggung politik. Keterkaitan kiai dengan politik dapat dipahami dengan melihat kedudukan kiai sebagai *trustee* santri yang mengharapkan bimbingan kultural lebih khususnya yang berkaitan dengan agama Islam (Madjid, 1997, hal. 77).

Secara objektif memang kiai terjun ke dunia politik haruslah membawa misi kepentingan agama. Kiai dianggap sebagai pemimpin umat Islam, terkhusus kiai yang memiliki pesantren. Pada setiap pemilihan umum, baik nasional maupun daerah, dukungan politik kiai diperebutkan antar partai-partai politik. Tidak hanya

partai politik berideologi Islam saja yang memperebutkan, tetapi partai politik berbasis ideologi nasionalis juga memperebutkan dukungan politik dari kiai dan pengikutnya.

Dalam memperoleh massa dari kiai, seringkali partai politik menempatkan kiai dalam jajaran kepengurusan yang sentral. Bahkan tidak sedikit partai politik memberikan kursi kepada kiai untuk maju dalam kontestasi politik. Hal itu yang menjadi alasan, sebagai upaya partai politik bisa memperoleh dukungan massa yang dimiliki kiai. Dalam upaya tersebut, tidak mengherankan safari politik ke pesantren-pesantren. Menarik untuk dilihat peran kiai dalam kancah politik sebab. *Pertama*, kiai merupakan tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam. Tidak hanya lingkup masalah keagamaan saja, tetapi juga masalah sosial, politik, budaya banyak masyarakat merujuk pada keputusan kiai. Sering terdengar istilah *sami'na wa atho'na*, yang menyebabkan bahwa apa yang menjadi keputusan kiai harus diikuti. Maka dari sebab pertama ini, keterlibatan kiai dalam politik dapat memberikan massa yang banyak untuk kemenangan suatu partai politik. *Kedua*, kiai merupakan tokoh kharismatis dalam masyarakat. Melalui kharisma yang dimilikinya, serta didukung legitimasi ahli dalam agama kiai dapat memiliki massa politik yang banyak dan bergerak secara efektif dan efisien. *Ketiga*, sebagian besar kiai, umat Islam harus mampu menggenggam peradaban, salah satu jalan untuk menggenggambanya yaitu dengan jalan di bidang politik (Moesa, 2007, hal. 113).

Sebenarnya keterlibatan kiai dalam bidang politik di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman penjajahan. Pesantren pada saat itu merupakan tempat lahirnya suatu aliran ideologi tertentu di Indonesia. Ideologi politik tersebut

dilembagakan dalam partai politik Nahdlatul Ulama (NU) yang dipegang oleh kiai-kiai dari organisasi NU. Memang dapat dibenarkan NU digeneralisasi sebagai partai politik Islam yang ada pada waktu itu berbarengan dengan Masyumi, PSII, dan Perti. Tetapi pada tahun 1952 ketika NU memisahkan diri dari Masyumi menjadi tidak dapat diterangkan. Generalisasi itu menjadi dasar percekocokan politik yang selama ini tidak dapat diterangkan secara gamblang.

Keterlibatan kiai dalam politik pada waktu itu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesiasalah satunya diwakili NU yang menmpuh kerjasama politik dengan Bung Karno, yang melahirkan kerangka NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunis). Hal itu tidak lepas dari keinginan NU untuk memegang hak prerogatif kursi Menteri Agama dipatahkan Masyumi yang mengangkat tokoh dari Muhammadiyah menjadi menteri agama kabinet Natsir (Madjid, 1997, hal. 79-80). Peran-peran kiai dalam bidang politik di Indonesia masih diperhitungkan sampai sekarang, dimulai ketika era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru pimpinan Soeharto tahun 1998.

Transformasi politik dimulai ketika adanya perubahan UU No. 22 Tahun 1999 diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Tujuan dari perubahan tersebut supaya tercipta pemilihan yang lebih demokratis. Proses demokrasi yang ditandai diselenggarakannya pemilihan kepala daerah ini, peran kiai diperhitungkan dalam perpolitikan untuk menentukan terpilihnya seorang calon kepala daerah (Subiyarko, 2011, hal. 1564).

Seiring pergeseran peran kiai dalam sebuah masyarakat yang sebelumnya sebagai seorang yang cakap dalam ilmu agama, kini kiai memiliki standar ganda dalam perannya. Di satu sisi kiai sebagai panutan, tokoh masyarakat, ilmuwan dalam agama Islam disisi lain kiai juga berperan dalam keterlibatan di bidang politik.

Terdapat dialektika pro-kontra terkait keterlibatan kiai dalam politik praktis, artinya disini masih ada perdebatan yang harus diselesaikan tentang masalah ini. Ujang Mahadi mengungkapkan bahwa kiai dapat terjun ke dunia politik praktis apabila seorang kiai benar-benar dilandasi memperjuangkan kepentingan agama, bukan individu (Mahadi, 2015). Berkelindan dengan pendapat Ujang Mahadi tersebut, bahwa kiai juga merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk dipilih maupun memilih. Artinya keberadaan kiai dalam politik praktis merupakan hak individu yang sudah diatur. Atas dasar legitimasi tersebut, kiai tidak bisa dibantah apabila terjun dalam dunia politik.

Perlu menjadi perhatian ketika kiai terlibat dalam politik praktis yaitu pengaruh memilih terhadap masyarakat yang secara geografis memang kondisi masyarakat masih mengkhawatirkan apa yang diperintah atau tidak dilakukan oleh kiai. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang untuk menjadi sasaran suara dengan menggandeng kiai dalam proses politik (Natsir, 2015).

Hal itu dapat menjadi pertimbangan kiai jika melihat pesantren-pesantren di Jombang yang mayoritas masyarakat Nahdlatul Ulama' (NU) beserta pesantrennya. Tetapi itu menjadi pilihan masyarakat sendiri apabila memang memilih apa yang

menjadi pilihan kiai. Kondisi yang sedemikian rupa tidak mungkin untuk mendiskreditkan masyarakat, karena secara kultural memang menjadikan kiai sebagai pedoman dalam lini segala kehidupan.

Pergeseran peran kiai yang memiliki dua peran sekaligus menjadi sorotan utama dalam kancah dunia Islam Indonesia. Kiai seakan menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh para politisi secara insidental ketika proses pemilu berlangsung untuk mendapatkan suara dari massa yang dimiliki kiai (Mi'mari, 2016). Jika dilihat memang ini menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan supaya agama yang benar-benar suci tidak dikotori oleh pemanfaatan kiai dalam politik praktis. Kiai hanya sebagai ajang yang digunakan politisi untuk menjadi pemenang dalam kontestasi, bukan benar-benar membawa misi kepentingan agama.

Hal senada diungkapkan oleh Syamsul Rijal bahwa ketika kiai terjun dalam dunia politik memang dapat mengembangkan eksistensi pesantrennya. Tapi di lain sisi juga dapat mengurangi kualitas yang seharusnya dikembangkan dalam dunia pendidikan di pesantrennya, karena kiai lebih tertarik untuk mengurus politikanya (Rijal, 2014).

Seperti yang diungkapkan Syamsul Rijal, hal demikian dapat menjadi bumerang bagi kiai untuk ditinggal santri atau pengikutnya. Kepercayaan yang semakin pudar karena waktu dan perhatian lebih condong ke dunia politikanya. Semakin luas, masyarakat menganggap kiai hanya memanfaatkan pengikutnya untuk maju dalam kontestasi politik praktis.

Demokrasi saat ini yang diwarnai keterlibatan kiai untuk meningkatkan suara calon dari partai tertentu sudah bukan hal tabu lagi di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Dalam proses pemilihan kepala daerah tingkat provinsi yang sering dikenal pilgub, setiap masyarakat Jawa Timur memiliki hak memilih gubernur yang pantas memimpin provinsi ini selama satu periode kedepan.

Hal itu ditandai dengan banyaknya safari politik yang dilakukan calon ke pesantren-pesantren besar pada saat pilgub dengan maksud memperkenalkan diri dan meminta dukungan suara supaya terpilih. Dalam tataran masyarakat Jawa Timur, kiai berada di pihak yang dominan, hubungan kiai-santri merupakan hubungan *dyadic-vertical*, artinya hubungan secara vertikal. Pemahaman santri mengenai baik-buruk, boleh-dilarang, semua tergantung keputusan kiai (Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transendental, 2001, hal. 41).

Fenomena menarik pada Pilgub Jawa Timur 2018 adalah bertemunya dua kader NU yang menjadi calon gubernur. Saifullah Yusuf dengan panggilan akrab Gus Ipul yang telah 10 tahun menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Timur dan Khofifah Indah Parawansa, Ketua Umum PP Muslimat NU yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial era Presiden Joko Widodo. Tampilnya dua kader NU sebagai calon pemimpin Jawa Timur satu periode kedepan membuat dinamika politik, terutama kalangan kiai bergerak meninggi. Kedua calon berusaha melakukan pendekatan ke kiai-kiai di Jawa Timur terutama kiai pengasuh suatu pondok pesantren (ponpes).

Kehadiran kiai dalam kancah politik di Jawa Timur menjadi perjudian yang harus teliti untuk melihat. Legitimasi keagamaan yang selama ini melekat pada sosok kiai harus digunakan dalam mempengaruhi tindakan sosial dan politik. Kharisma kiai tidak selalu langgeng, sudah banyak kharisma itu hancur hanya sebab kiai terjun dalam politik yang mengakibatkan berselingkuh dengan kekuasaan. Pada saat masyarakat mulai memudar kepercayaannya kepada kiai, secara perlahan akan meninggalkannya.

Keikutsertaan kiai dalam politik di daerah Jawa Timur menarik perhatian untuk diteliti untuk mengetahui bagaimana kiai yang notabene merupakan tokoh masyarakat, guru bagi santri pesantren memainkan perannya sekaligus dalam bidang politik, terkhusus di Pondok Pesantren Darul ‘Ulum (PPDU) Peterongan Jombang. Peran kiai seolah menjadi peran ganda di tengah masyarakat, kiai sebagai orang yang menjadi pedoman dalam menjalankan agama Islam, serta sebagai politisi. Memang sebenarnya dua hal itu merupakan satu kesatuan, tetapi pergeseran perilaku politik saat ini memang buruk oleh sebagian kalangan masyarakat.

Sering kali terjadi bahwa kiai melakukan bentuk pesan-pesan politis di pesantren kepada santrinya di pesantren. Hak kekuasaan kiai kepada santri, kiai menuntut santri untuk sesuai memilih dengan pilihannya. Hal ini merupakan sebuah bentuk *patrone* kiai kepada santri yang selalu cenderung untuk menurut. Maka ini menjadi salah satu penyebab para elite politik menggandeng kiai dalam waktu insidental saja.

Figur kiai di pesantren ini merupakan pengasuh, pendiri, sekaligus guru bagi santri dan masyarakat di sekitar pesantren. Selain itu kerap kali kiai di PPDU akhir-akhir ini tidak hanya sebagai orang yang cakap dalam ilmu agama saja, tetapi kiai di pesantren ini juga sebagai panutan santri dalam menentukan sikap politik. Dilain sisi kedekatan para kiai di Darul ‘Ulum dengan para politisi membuat pesantren ini sebagai tempat safari politik oleh para kandidat calon.

Apabila ditinjau dari segi historis, Pondok Pesantren Darul ‘Ulum atau biasa dikenal PPDU ini sudah banyak terlibat dalam politik sejak era orde baru. Pada pelaksanaan pemilu tahun 1971, ketika GOLKAR, melalui pemerintah lebih khususnya departemen dalam negeri giat melakukan kampanye politik ke pondok pesantren. Darul ‘Ulum sendiri mendapatkan bantuan uang sejumlah 25 juta rupiah dari kampanye GOLKAR ke pesantren ini. Beberapa kiai PPDU juga banyak mendapatkan kedudukan politik di era itu, seperti kiai Bisri Kholil dan Sofya Kholil pernah sebagai anggota DPR pusat, Kiai As’ad Umar menjabat sebagai Ketua DPRD Jombang.

Kiai Musta’in Romly, salah satu pengasuh PPDU pada waktu itu yang terkenal dalam bidang tasawuf sekaligus pemimpin tarekat Qadiriyyah wan Naqsyabandiyah merupakan kiai yang mempengaruhi sikap politik darul ‘Ulum masa itu. Salah satu pengaruh besar kiai Musta’in terasa di kalangan mahasiswa Universitas Darul ‘Ulum (UNDAR), yaitu sikap politik mahasiswa yang lebih cenderung simpatik terhadap pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini terjadi karena kiai Musta’in menjalin hubungan baik tokoh-tokoh pusat seperti Ali Murtopo dan Sudjono Humardhani bahkan sampai presiden Soeharto pernah

berkunjung ke pesantren ini di lain waktu. Ketika peristiwa malari pada tahun 1974, mahasiswa Undar menjadi sandran pemerintah untuk mendapatkan jaminan keamanan (Madjid, 1997, hal. 86-88).

Menjadi persoalan apabila memang kiai di pesantren ini secara berkala selalu melibatkan diri dalam politik praktis. Secara eksistensi, memang keberadaan Darul 'Ulum sudah dikenal masyarakat secara umum. Tetapi hal itu dapat menjadi pudar mengingat pernyataan Syamsul Rijal bahwa keterlibatan kiai dalam politik praktis dapat menjadi bumerang untuk ditinggal santrinya.

Jika dikaji memang terdapat berbagai pendapat terkait perlu-tidaknya kiai dalam politik. Tapi yang menjadi menarik di pesantren Darul 'Ulum ini yaitu bahwa beberapa kiai yang terlibat tidak dalam satu kongsi partai politik, tetapi berbagai golongan partai yang diikuti. Artinya ini menjadi kajian yang harus diselesaikan apabila terdapat perbedaan yang berdampak pada stabilitas pendidikan di pesantren ini.

Figur kiai di Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang di kancah perpolitikan sepenuhnya tergantung pada kesadaran kiai dari godaan materiil di dunia, serta pengaruh manfaat untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Keberadaan kiai memainkan peran politisnya, mempunyai dua pilihan yaitu, menciptakan keberpihakan kepada semua golongan, atau justru keberpihakan pada satu golongan saja dengan kata lain guna memenuhi kepentingan pribadi.

Pada era yang sekarang, kiai ataupun *gus* (panggilan untuk anak kiai) di pesantren Darul 'Ulum terdapat beberapa yang aktif di politik, bahkan menduduki

jabatan-jabatan yang strategis. *Pertama*, ada HM. Zahrul Azhar atau akrab dipanggil Gus Hans yang sebagai pengasuh asrama Queen Al-Azhar. Pada pilgub Jawa Timur 2018 kemarin beliau merupakan juru bicara (jubir) dari pasangan Khofifah-Emil. Di partai politik Gus Hans sebagai wakil ketua DPD Partai Golkar.

Kedua, ada HM. Zahrul Jihad As'ad atau yang akrab dipanggil Gus Heri, beliau merupakan anggota dari partai Demokrat. *Ketiga*, H. Syarif Hidayatullah, beliau merupakan pengasuh asrama Sulaiman-Bilqis. Dalam kancah politik beliau merupakan anggota DPRD Kabupaten Jombang periode 2014-2019 berasal dari partai Demokrat. Gus Sentot juga sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jombang.

Perlu untuk memperluas kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan melihat berbagai pendapat, termasuk perspektif dari santri. Praktik peran politik kiai di Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang sangat diperhitungkan, karena memiliki basis pesantren dengan jumlah santri ribuan menyebabkan banyak kunjungan politik ke pesantren ini guna memperoleh dukungan suara. Dari fakta tersebut kiai memiliki peran sosial bagi santri dan masyarakat serta peran sikap politik bagi penganutnya, sehingga turut terlibat dalam aksi politik pada pilkada Jawa Timur. Hal ini yang menjadi fokus ketertarikan penulis untuk meneliti **Dampak Keterlibatan Kiai Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Dalam Perspektif Santri (Studi di: Pondok Pesantren Darul 'Ulum, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam fokus penelitian ini yaitu:

Bagaimana dampak keterlibatan kiai pada pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2018 dalam perspektif santri di Pondok Pesantren Darul ‘Ulum, Peterongan Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini guna memperoleh identifikasi berdasarkan pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui dampak terhadap keterlibatan kiai pada pemilihan gubernur Jawa Timur 2018 dalam perspektif santri di Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Peterongan Jombang.

D. Manfaat penelitian

Pada umumnya manfaat penelitian terbagi menjadi dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek akademis. Manfaat secara aspek teoritis berguna untuk memberikan kontribusi terhadap teori dan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia akademik. Sementara manfaat secara praktis yaitu berguna untuk memberikan kontribusi praktis dari peneliti kepada objek yang diteliti. Maka penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk menambah referensi dan memperkaya informasi tentang praktik politik kiai,

khususnya tentang perspektif santri terhadap keterlibatan kiai dalam pemilihan gubernur Jawa Timur 2018 sebagai upaya meningkatkan konsep dibidang pengetahuan politik kiai.

- b. Sebagai bahan referensi dan menambah wawasan khazanah kelimuan, khususnya di jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan tawaran pemikiran bagi elite politik, kiai, santri, dan masyarakat secara umum berhubungan dengan konsekuensi kedepan secara positif dan negatif dari fenomena aksi langsung kiai dalam politik praktis.

E. Literatur Review

Figur kiai di Provinsi Jambi melakukan praktek politik secara langsung dengan melibatkan diri atau dilibatkan dalam proses pemilihan kepala daerah. Hal ini karena kiai di Provinsi Jambi memiliki basis massa yang riil. Maka keterlibatan kiai dalam proses pemilukada sangat berarti bagi setiap pasangan calon untuk memperoleh suara dari massa kiai. Keterlibatan ini hanya berlangsung dalam musim pilgub (Mi'mari, 2016).

Sedangkan praktik keterlibatan kiai di pilgub Jawa Timur, khususnya kiai lingkup Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang sudah barang tentu selain memiliki massa riil di pesantren, juga punya relasi dengan pemerintah. Terbukti banyaknya kiai di pesantren ini masuk dalam jajaran partai politik. Hal ini yang

menjadi sedikit tumpang tindih, yang menyebabkan santri harus memiliki pandangan terhadap kiai di pesantrennya.

Praktik yang sudah berlangsung dari era orde lama ini menjadi sorotan penting dalam sejarah pesantren. Hal ini dapat muncul yang dapat membawa dampak terhadap pesantren. Di satu sisi, keterlibatan kiai dapat menjadi kekuatan eksistensi pesantren yang diasuhnya, tetapi di sisi lain kiai terlampau sibuk mengurus politik yang menyebabkan berkurangnya waktu dan perhatiannya untuk mengurus pesantren dan santrinya. Pesantren yang terlampau aktif dalam urusan politik, dapat memungkinkan ditinggal santrinya (Rijal, 2014).

Dalam hal ini yang mungkin bisa terjadi di Pondok Pesantren Darul ‘Ulum, kiai yang sibuk dengan politiknya dapat menjadikan kurangnya kepercayaan santri terhadap kiai. Dilain sisi memang hal ini yang menyebabkan pesantren ini dapat berkembang sangat pesat, terutama dalam hal pendidikannya yang tidak hanya pendidikan pesantren, tetapi juga pendidikan formal. Terlihat tidak hanya madrasah saja , tetapi pendidikan umum seperti SMA, SMP bahkan SD juga berdiri di pesantren ini.

Berkembangnya pesantren ini terdapat kaitannya dengan politik yang dilakukan kiai, pada waktu itu mendapatkan sokongan dana ketika kampanye politik di pesantren ini. Hubungan yang baik antara kiai dengan pemerintah menyebabkan pesantren ini tidak luput dari agenda politik oleh setiap calon. Santri yang bermukim di pesantren, pasti mendapatkan implikasi positif maupun

negatif dari kegiatan politik yang dilakukan kiainya. Maka perlu kiranya pandangan santri untuk melihat fenomena hal tersebut pada pilgub Jawa Timur 2018.

Sementara menurut Ujang Mahadi menjelaskan bahwa keterlibatan kiai di dalam dunia politik terkhusus Kota Bengkulu terlihat jelas peran politiknya. Terlihat ketika para kiai yang terlibat sangat gigih untuk memperjuangkan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan agama waktu sidang di DPRD Kota Bengkulu (Mahadi, 2015, hal. 248).

Pada politik kiai yang dimainkan oleh para pengasuh di Pondok Pesantren Darul ‘Ulum dapat terjadi kepentingan untuk urusan egosentris agama maupun hubungan antara pesantren dengan pemerintah. Hal itu dapat menjadi sebuah indikasi yang perlu ditelaah lebih dalam. Ketika seorang kiai yang sekaligus menjadi pengasuh lembaga pendidikan pesantren bermain politik secara langsung, dapat menciptakan suatu timbal balik positif atau negatif dari santrinya.

Terdapat pemahaman yang saling bertolak belakang antara perlu tidaknya kiai ikut campur dalam politik praktis. *Pertama*, kiai yang setuju untuk terjun langsung dalam politik praktis beranggapan bahwa sebagai upaya memperjuangkan Islam melalui kekuasaan yang dipegang. *Kedua*, kiai yang tidak setuju untuk terjun di politik praktis menganggap bahwa dakwah Islam dapat lebih leluasa ketika tidak tersekat oleh kepartaian (Sadi, 2016, hal. 20).

Hal ini yang dapat terjadi pada kiai di ponpes Darul ‘Ulum, kedua kemungkinan itu bisa terjadi diantara salah satunya. Tetapi dari kedua kemungkinan yang dipaparkan oleh Sadi tersebut dapat terjadi pada poin pertama, karena kiai di pondok pesantren ini sudah terjerumus dalam lingkungan politik praktis. Artinya apabila kiai dapat memanfaatkan jabatan politik maupun terjun di dunia politik praktis sebagai ajang untuk memperjuangkan Islam melalui kekuasaannya yang di dapatkan.

Sementara menurut (Natsir, 2015), masyarakat Kota Tasikmalaya memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku memilih dalam pemilihan umum. Salah satunya yaitu peran organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persis yang memiliki basis di Kota Tasikmalaya. Ketiga organisasi Islam tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku memilih di Tasikmalaya. Selain itu juga terdapat partai politik yang berideologi Islam seperti PPP yang diidentikkan dengan orang-orang NU menjadi faktor yang mempengaruhi masyarakat Tasikmalaya dalam memilih pemimpin.

Di Provinsi Jawa Timur, lebih khususnya di Kabupaten Jombang merupakan basis kuat organisasi NU. Tidak dapat di alihkan bahwa Jombang merupakan kekuatan sentral dimana organisasi itu lahir dan banyak tokoh-tokoh NU lahir di tanah Jombang. Darul Ulum juga sebagai pondok yang beraliran Islam NU tidak dapat dipungkiri bahwa kiai di pesantren ini menganut ajaran NU. Maka dalam tataran politik praktis, kiai yang berafiliasi dengan partai politik menjadi panutan masyarakat untuk memilih sesuai dengan pilihan kiai

ataupun memilih kiainya jika kiai tersebut menjadi calon. Hal ini menjadi basis kekuatan kiai untuk memenangkan kompetisi pilgub Jawa Timur 2018.

Hubungan antara kiai dengan santri atau masyarakat di Jombang memiliki konsep yang dikenal dengan sikap *ta'zhim*, yakni sikap hormat, patuh, dan menjalankan yang menjadi perintah kiai (gurunya). Sikap *ta'zhim* ini tidak hanya berlangsung ketika santri belajar di pesantren saja, tetapi berlangsung sampai keluar dari pesantren. Maka sikap tersebut dapat berkembang ke lingkungan tempat tinggal yang menjadikan kiai nya di pesantren sebagai sosok yang berkharisma untuk di patuhi.

Sementara Zainuddin Syarif mengungkapkan pada penelitiannya tentang pergeseran perilaku politik kiai dan santri di Pamekasan Madura mengungkapkan terdapat tiga unsur peran kiai dalam politik. *Pertama*, bahwa kiai dalam keterlibatannya di politik mempertahankan pada *traditional domination* dan *charismatic domination*, artinya hubungan kiai-santri dalam lingkup *barakah*, *tawadu'* dan simbol-simbol yang berkaitan dengan moral. *Kedua*, kiprah kiai di tataran politik merupakan perjuangan yang dijunjung nilai-nilai agama. Pada instrumen kedua ini terdapat pandangan bahwa antara agama dan politik tidak terpisahkan. *Ketiga*, sikap santri dalam politik terbelenggu oleh *tawadu'*. Jadi kiai ditempatkan sebagai panutan dalam segala hal termasuk sosial-keagamaan (Syarif, 2016).

Dalam penelitian di Pondok Pesantren Darul 'Ulum, dapat menjadi perhatian khusus pada unsur ketiga yaitu sikap dan pandangan santri terhadap

kiainya yang terjun di dunia politik praktis. Perspektif santri dibutuhkan untuk menjadi bahan kajian oleh kiai tentang pantas tidaknya seorang kiai yang menjadi panutan sosial-keagamaan santri ikut serta dalam politik.

Khazanah baru juga diungkapkan Mohamad Khoirul Fata yang menunjukkan tentang akumulasi keterlibatan santri dalam partai politik secara langsung maupun tidak langsung. Fata mencoba untuk melihat bentuk polarisasi santri dalam pilpres 2019. Pada kontestasi pilpres 2019 yang membawa unsur keagamaan antara kubu Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi perlu untuk mengalkulasi kelompok Islam mayoritas yang terlibat. Hal itu yang dicoba oleh Fata untuk melihat polarisasi santri, pergeseran terminologi santri dari zaman ke zaman (Fata, 2018).

Terdapat kesamaan yang bakal menjadi fokus penelitian di ponpes Darul Ulum, yaitu tentang pergeseran terminologi santri. Khazanah ini menjadi perhatian untuk melihat kesadaran santri terhadap politik dari waktu ke waktu. Selain itu juga mencari penyebab apa yang menjadikan pergeseran itu. Kiai menjadi objek yang dinilai santri terkait keterlibatannya dalam politik.

Literatur yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

1. Tabel Persamaan

Tabel persamaan yang dimaksud adalah persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dalam table ini akan dipaparkan persamaan dari penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berikut table persamaan:

Tabel 1.1

No	Judul	Penulis dan Tahun	Isi	Perbandingan
1	Peran Politik Kiai Dalam Pendidikan Pesantren	Syamsul Rijal, 2014	Keterlibatan kiai memberikan dampak ke santri yaitu, berkurangnya waktu dan perhatian untuk mengurus santri dan pesantrennya	Dalam penelitian ini ada kemiripan yang membahas tentang dampak keterlibatan kiai dalam politik praktis.
2	Kiai dan Politik: Mengintip Motif Kiai NU (Nahdlatul Ulama) Dalam Pemilu 2009 di Glenmore Kabupaten Banyuwangi	H. Sadi, 2016	Penelitian ini menjelaskan bahwaada tolak belakang terkait perlu tidaknya kiai terjun di politik. <i>Pertama</i> , kiai yang setuju untuk terjun langsung dalam politik praktis beranggapan bahwa sebagai upaya memperjuangkan Islam melalui kekuasaan yang dipegang. <i>Kedua</i> , kiai yang tidak setuju untuk terjun di politik praktis menganggap bahwa dakwah Islam dapat lebih leluasa ketika tidak tersekat oleh kepartaian	Terdapat persamaan dalam kemungkinan penelitian ini, karena salah satu dari ketiga poin yang disampaikan oleh Sadi terjadi di penelitian ini. Kiai yangterjun di dunia politik gigih memperjuangkan agama, yang memberikan dampak terhadap Islam, lebih khususnya pesantren yang diasuh.
3	Kyai Dan Islam Dalam Mempengaruhi	Nurlatipah Natsir, 2015	Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang	Persamaan dalam penelitian ini adalah bentuk

	Perilaku Memilih Masyarakat Kota Tasikmalaya		mempengaruhi masyarakat dalam memilih di pemilihan umum salah satunya yaitu organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persis	perilaku kiai untuk mempengaruhi santri dalam pemilihan gubernur.
4	Membaca Polarisasi Santri Dalam Kontestasi Pilpres 2019	Mohamad Khoirul Fata, 2019	Penelitian Fata menjelaskan bentuk akumulasi keterlibatan santri dalam partai politik secara langsung dan tidak langsung. Dalam pilpres 2019 yang salah satu pasangan calon membawa unsur keagamaan, Fata melihat polarisasi santri dengan mengalkulasi keterlibatannya	Persamaan dalam penelitian ini ada pada bagian pergeseran terminologi santri sebagai akibat dari campur tangan kiai di politik praktis
5	Peran Kiai Dalam Membangun Partisipasi Memilih	Nurhadi, Sunarso, 2018	Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa kiai mempunyai peranan dalam membangun partisipasi memilih masyarakat di Madura. Kiai menjadi <i>patron</i> masyarakat dan santri sebagai pertimbangan untuk memilih. Selain itu kiai mempunyai peranan dengan masuk sebagai elit politik. Cara yang digunakan untuk mempengaruhi masyarakat ataupun santri dengan menggunakan panggung dakwahnya yang digunakan untuk	Terdapat kesamaan dengan penelitian ini, yaitu peranan kiai yang menjadi <i>patron</i> dari santri di ponpes Darul 'Ulum, Jombang. Dilain sisi beberapa kiai juga masuk dalam elit politik.

			menyampaikan pesan politik	
6	Keterlibatan Kiai Dalam Politik Praktis dan Implikasinya Terhadap Masyarakat	Eko Setiawan, 2014	Penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kiai terlibat di politik praktis. Ada beberapa disinggung peneliti terkait implikasinya terhadap masyarakat. Kiai di penelitian ini menjadi kehilangan figur kharismanya ketika mereka duduk di jajaran elit politik	Persamaan yang ada terletak di bentuk praktek kiai dalam pusran politik praktis

2. Tabel Perbedaan

Tabel perbedaan yang dimaksud disini adalah table yang bakal menjelaskan terkait perbedaan penelitian tentang politik kiai yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berikut table perbedaan:

Tabel 1.2

No	Judul	Penulis dan Tahun	Isi	Perbandingan
1	Politik Kiai (Studi Kasus Praktik Politik Kiai pada Pilgub Provinsi Jambi Tahun 2015)	Muhandisun Mi'mari, 2015	Figur kiai di Provinsi Jambi memiliki massa yang riil dan keterlibatan kiai sangat berarti bagi calon untuk mendapatkan simpati massa dari kiai. Keterlibatan ini bersifat insidental waktu musim pilgub saja	Perbedaan dari penelitian tersebut adalah penelitian ini menjelaskan lebih kepada dampak dari keterlibatan kiai dalam politik praktis
2	Peran Politik Kiai Dalam Pendidikan Pesantren	Syamsul Rijal, 2014	Keterlibatan kiai memberikan dampak ke santri yaitu, berkurangnya waktu	Perbedaannya yaitu dampak yang bakal dijelaskan adalah

			dan perhatian untuk mengurus santri dan pesantrennya	dampak positif maupun negatif
3	Komunikasi Politik Kiai Pada Kampanye Pemilu	Ujang Mahadi, 2015	Keterlibatan kiai di Kota Bengkulu terlihat jelas dengan peran kiai yang gigih memperjuangkan kepentingan agama waktu sidang DPRD di Kota Bengkulu	Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa keterlibatan kiai akan memberikan dampak, serta hubungan timbal balik kiai dan pesantren dengan pemerintah
4	Kyai Dan Islam Dalam Mempengaruhi Perilaku Memilih Masyarakat Kota Tasikmalaya	Nurlatipah Natsir, 2015	Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih di pemilihan umum salah satunya yaitu organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persis	Persamaan dalam penelitian ini adalah bentuk perilaku kiai untuk mempengaruhi santri dalam pemilihan gubernur. Perbedaannya terlihat dari subjek aktornya, yaitu kiai menjadi aktor terhadap santri
5	Pergeseran Perilaku Politik Kiai Dan Santri Di Pamekasan Madura	Zainuddin Syarif, 2016	Dalam penelitian ini lebih banyak menjelaskan tentang sebab pergeseran perilaku kiai dari figur ulama ke figur politik. Pergeseran perilaku tersebut didasari atas sikap santri yang selalu patuh terhadap kiai, dan kiai memanfaatkan sebagai lumbung massa dalam politik	Perbedaan di penelitian ini lebih kepada dampak dari perilaku kiai. Serta perhatian khusus kepada sikan dan pandangan santri terhadap kainya yang terjun di dunia politik praktis

6	Membaca Polarisasi Santri Dalam Kontestasi Pilpres 2019	Mohamad Khoirul Fata, 2019	Penelitian Fata menjelaskan bentuk akumulasi keterlibatan santri dalam partai politik secara langsung dan tidak langsung. Dalam pilpres 2019 yang salah satu pasangan calon membawa unsur keagamaan, Fata melihat polarisasi santri dengan mengalkulasi keterlibatannya	Perbedaan terdapat di bagian objek santri, dalam penelitian ini santri hanya sebagai sumber pandangan terhadap kiainya, bukan sebagai aktor politik.
7	Keterlibatan Kiai Dalam Politik Praktis dan Implikasinya Terhadap Masyarakat	Eko Setiawan, 2014	Penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kiai terlibat di politik praktis. Ada beberapa disinggung peneliti terkait implikasinya terhadap masyarakat. Kiai di penelitian ini menjadi kehilangan figur kharismanya ketikan mereka duduk di jajaran elit politik	Perbedaan di penelitian ini terdapat pada dampak yang terjadi, yaitu kepada santri dan pondok pesantren.
8	Pembelahan Politik Kiai NU di Pilgub Jatim 2018	Ainur Rohim, 2018	Dalam jurnal ini menjelaskan tentang pertarungan antar kubu di internal kiai-kiai NU. Dijelaskan bahwa dari setiap pasangan calon memiliki basis kiai masing-masing. Dan ini yang menjadi penyebab pertarungan struktural di NU menjadi terbelah. Dapat dilihat bahwa Gus Ipul dan Khofifah yang menjadi calon waktu itu sama-sama	Perbedaan dengan penelitian ini tidak menjelaskan terkait pembelahan di internal ormas yang terlibat, tetapi lebih mendalam terkait dampak yang ditimbulkan oleh kiai yang terjun di politik praktis.

			memiliki latar belakang NU	
--	--	--	----------------------------	--

Secara garis besar, berdasarkan kajian literatur yang sudah ada cenderung lebih banyak membahas tentang faktor-faktor penyebab kiai terjun dalam dunia politik praktis. Penelitian terdahulu juga lebih fokus pada masyarakat sebagai objek pendapat dan pergulatan terkait perlu-tidaknya kiai berada di jajaran elit politik.

Melihat kajian literatur sebelumnya, maka peneliti akan melakukan penelitian yang lebih berbeda dari sebelumnya. Penelitian ini akan lebih terfokus pada dampak keterlibatan kiai di politik praktis, lebih khususnya pada pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2019. Selain itu objek yang bakal dijadikan penelitian bukan masyarakat umum, tetapi lebih khusus ke santri sebuah pondok pesantren. Tidak dapat dipngkiri bahwa sosok kiai sebenarnya lebih identik dengan memiliki sebuah pesantren, maka penelitian ini akan meneliti pandangan dalam perspektif santri terkait keterlibatan kiainya yang terjun di politik.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis (*theoretical framework*) merupakan kerangka berpikir kita yang bersifat teoritis yang berhubungan dengan masalah yang kita teliti. Kerangka teori ini menjelaskan tentang gambaran hubungan antar variabel-variabel yang menjadi bahan penelitian. Teori yang bakal digunakan dalam penelitian harus memiliki proporsi yang terbukti kebenarannya. Suatu teori

mempunyai tujuan supaya fenomena atau kejadian yang bakal diteliti memiliki gambaran yang sistematis (Adi, 2010).

Maka teori-teori yang bakal digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Politik

A. Pengertian Partisipasi Politik

Dalam negara demokrasi, salah satu aspek yang fundamental untuk mendukung supaya tujuan dapat tercapai adalah partisipasi politik. Karena memang segala kebijakan yang di putuskan oleh pemerintah menyangkut kehidupan masyarakat.

Menurut Norman H. Nie dan Sydney Verba dalam *Handbook of Political Science* (1975) dalam (Bisri, 2013) partisipasi politik diartikan sebagai keterlibatan warga negara untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Jika dilihat disitu terdapat unsur masyarakat yang dilibatkan dalam menentukan sebuah kebijakan.

Berdasar definisi diatas, maka partisipasi politik memang haruslah dilaksanakan, supaya iklim demokrasi dapat berjalan dengan baik. Artinya tidak ada dominasi lebih dari satu pihak, antara pemerintah dengan masyarakat masing-masing memiliki hubungan saling menguntungkan.

Dalam partisipasi politik, masyarakat meyakini bahwa dengan ikut berpartisipasi dalam politik dapat menyalurkan kepentingan dan

kebutuhan, atau sedikitnya diperhatikan, dan ikut dalam mempengaruhi segala tindakan pemerintah untuk menentukan kebijakan.

Pada kasus keterlibatan kiai dalam pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2018 dalam perspektif santri jelas bukan hanya seorang kiai saja yang menjadi dalang semuanya terjadi. Tetapi ada beberapa aktor yang terlibat disitu yaitu:

a. Kiai

Kiai disini menjadi aktor dalam menyampaikan pesan politik apa yang diinginkan oleh para politisi, ditambah dengan keinginan kiai untuk menerima bantuan atau menjaga eksistensi pesantrennya tetap ada.

b. Santri

Dalam kasus ini, santri hanya sebagai objek, artinya santri hanya diinginkan suaranya untuk memilih pilihan yang dianjurkan kiai. Diluar itu santri tidak mengetahui apapun, karena kultur santri di Jombang selalu *sami'na wa atho'na* kepada kiainya.

c. Politisi/Partai Politik

Partai politik atau politisi yang memiliki hajat dalam pemilihan gubernur menjadi dalang utama. Ini yang menjadikan polarisasi terjadi ditubuh pesantren atau kiai di zaman sekarang.

Dengan tawaran ekonomi ke pesantren jelas menjadi kekuatan untuk menggandeng pesantren atau kiai dalam kontestasi

B. Bentuk Partisipasi Politik

Dalam kejadian di berbagai negara, bentuk partisipasi politik mempunyai banyak bentuk. Menurut Samuel Huntington dan Joam M. Nelson dalam (Saputra R. P., 2016) dibedakan atas lima (5) klasifikasi kegiatan politik yaitu sebagai berikut: (Saputra R. P., 2016).

1. Electoral Activity

Dalam bentuk *electoral activity*, kegiatan dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan pemilu. Kegiatan dalam bentuk ini dapat berupa; a) pemberian sumbangan, b) menjadi relawan dalam kampanye partai politik, c) mengajak orang guna mendukung dan memilih, d) ikut dalam memberikan suara, e) mengawasi penghitungan suara, serta ikut dalam menilai calon yang maju dan menilai visi-misi yang disampaikan.

2. Lobbying

Lobbying dalam hal ini merupakan tindakan seseorang maupun kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat penting dalam pemerintahan serta tokoh-tokoh politik dengan tujuan mempengaruhi yang menyangkut masalah-masalah tertentu dalam kehidupan mereka.

3. Organizational activity

Bentuk ini merupakan keterlibatan masyarakat dalam berbagai organisasi masyarakat, baik organisasi sosial atau politik. Dengan terlibat aktif di organisasi, dapat memungkinkan untuk mempengaruhi pemerintah dalam membuat dan/atau merumuskan sebuah kebijakan

4. *Contacting*

Bentuk ini merupakan partisipasi dari warga negara secara langsung, artinya dapat dengan mendatangi ke tempat yang bertugas, ataupun lewat media yang lain. Bentuk ini dilakukan langsung terhadap pejabat pemerintah ataupun tokoh politik.

5. *Violence*

Bentuk ini merupakan partisipasi politik yang bersifat kekerasan, supaya dapat mempengaruhi pemerintah. Bentuk kekerasan ini dapat berupa kekerasan terhadap manusia maupun materiil (Saputra R. P., 2016).

C. Faktor-faktor Partisipasi Politik

Partisipasi politik yaitu merupakan suatu aktivitas yang tentunya terdapat suatu pengaruh yang disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Firmanzah, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan partisipasi politik masyarakat, yaitu:

1. Kondisi awal pemilih

Kondisi awal pemilih ini merupakan karakter yang memang dimiliki oleh pemilih, artinya setiap individu mempunyai nilai

maupun kepercayaan dan kemampuan yang sudah melekat. Selain itu kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan individu juga dapat mempengaruhi seseorang untuk membuat suatu keputusan. Dilain sisi, faktor lingkungan individu berinteraksi sangat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu tersebut.

2. Media massa

Di era sekarang, memang media massa merupakan alat yang dapat mempengaruhi seseorang dalam hal apapun, tak terkecuali dalam partisipasi politik masyarakat. Kemampuan media massa dalam memberikan informasi merupakan suatu pembentukan opini masyarakat. Distribusi informasi yang sangat massif menentukan opini publik tersebut.

3. Partai Politik/kontestan

Partai politik ataupun kontestan dalam pemilihan umum akan mempengaruhi masyarakat lewat reputasi calon, latar belakang, ideologi, bahkan kualitas dari calon yang maju dalam kontestasi. (Firmanzah, 2007) dalam (Syaputra, 2012).

D. Perilaku Pemilih

Dalam partisipasi politik, tentunya masyarakat memiliki keyakinan yang didasari oleh faktor-faktor yang ada. Hal itu yang menyebabkan timbulnya perilaku pemilih untuk mengambil keputusan guna memilih sebuah partai politik maupun calon dalam kontestasi politik. Perilaku tersebut didasari oleh pandangan individu dalam

menganalisa kontestan, baik latar belakang, *image*, ideologi, kualitas calon, serta profil-profil dari kontestan.

Menurut Firmanzah dalam (Barisan, 2015), terdapat empat perilaku pemilih yaitu sebagai berikut:

a. Pemilih rasional

Pemilih jenis ini memiliki orientasi dalam penyelesaian masalah, bukan pada orientasi ideologi yang tinggi. Pemilih rasional memiliki pemahaman tentang politik yang mendalam dan fokus kepada program yang ditawarkan oleh calon maupun kontestan.

Perilaku pemilih ini melakukan pendekatan yang rasional, artinya pemilih memang benar-benar memberikan penilaian terhadap program yang ditawarkan. Pemilih rasional memiliki prinsip dan pengetahuan yang kuat sebagai landasan untuk menentukan pilihan berdasarkan perhitungan yang logis. Pemilih rasional pada intinya sebelum menentukan pilihannya, melihat dan menganalisa terlebih dahulu profil maupun *track record* calon atau partai politik.

Menurut Eep Saifullah dalam Efriza (2010) dalam (Barisan, 2015) pemilih jenis ini merupakan pemilih yang menggunakan perhitungan secara rasional dan logika dalam menentukan pilihannya. Kelompok pemilih ini sangat peduli dengan *track*

record calon maupun visi misi yang menjadi tawaran program dari kandidat.

b. Pemilih Kritis

Pemilih kritis merupakan karakteristik pemilih politik identitas dan figur berkualitas, artinya pemilih kritis ini memfokuskan perhatiannya untuk menentukan pilihan melihat figur yang maju dalam kontestasi. Pemilih kritis merupakan perpaduan dari dua orientasi yaitu, memandang bahwa seorang calon atau partai politik harus menawarkan program yang dilaksanakan berupa menyelesaikan permasalahan yang ada dan orientasi akan suatu yang lebih bersifat ideologis.

Menurut Firmanzah, pemilih kritis melalui dua mekanisme sebelum menentukan pilihannya. *Pertama*, nilai ideologis sebagai landasan berpijak untuk menentukan kandidat atau partai politik mana yang bakal berpihak. Setelah itu mengkritisi program atau kebijakan yang menjadi rancangan atau yang sudah dilaksanakan. *Kedua*, pemilih terlebih dahulu tertari akan program yang menjadi tawaran kandidat atau partai politik, sebelum nantinya mencoba untuk memaami nilai-nilai yang menjadi latar belakang dalam membuat kebijakan atau program kerja tersebut (Firmanzah, 2007).

Pemilih kritis ini adalah jenis pemilih yang banyak dijumpai di negara plural, seperti halnya di Indonesia. Pemilih kritis lebih

sering untuk menolak partai politik atau calon yang tidak memiliki kesamaan ideologi dengannya, karena pemilih jenis ini melakukan identifikasi berdasar dua variabel yaitu ideologi dan kemampuan partai politik maupun kontestan.

c. Pemilih Tradisional

Pemilih jenis ini menurut Firmanzah mempunyai dasar ideologi yang sangat kuat. Artinya pemilih tradisional memilih berdasarkan kesamaan ideologi, sementara terkait kebijakan atau tawaran program dari partai politik maupun kandidat tidak diperhatikan sebagai landasan utama. Pemilih tradisional dapat dilihat dari ciri khasnya yang terlihat yaitu loyalistik yang sangat tinggi.

Karakteristik dari pemilih tradisional ini biasanya mempunyai kedekatan dengan mitos-mitos maupun nilai historis. Maka pertimbangan dalam keputusan memilihnya berdasarkan sosial budaya, etnis, ataupun agama yang menjadi landasannya. Menurut Surbakti dalam (Barisan, 2015) pemilih tradisional dalam membuat keputusan memilihnya didasari atas jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, serta agama.

d. Pemilih Skeptis

Pada umumnya, pemilih skeptis tidak memiliki keinginan untuk terlibat dalam politik, karena faktor ideologis pemilih jenis

ini sangatlah rendah. Pemilih jenis ini kurang peduli terhadap arah kebijakan ataupun program kerja yang ditawarkan kandidat.

Martin Lipset menjelaskan masyarakat yang berperilaku sebagai pemilih skeptis pada umumnya dari kalangan berpendapatan rendah serta pendidikan yang rendah (Barisan, 2015). Di Indonesia biasa disebut dengan golongan putih (golput) untuk pemilih jenis ini, karena memang pemilih skeptis didominasi oleh golongan putih.

Meningkatnya jenis pemilih ini, artinya golongan putih pun semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan sebagai ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik maupun kandidat. Pemilih skeptis berkeyakinan bahwa siapapun yang memenangkan kontestasi tidak bakal membawa perbaikan kedepan

E. Dampak Partisipasi Politik

Dampak keterlibatan kiai dalam politik sendiri dapat berasal dari internal dan eksternal. Dampak internal merupakan dampak yang berasal dari dalam masyarakat, sementara dampak eksternal adalah dampak yang berasal dari luar masyarakat. Mangkusubroto dalam (Al-Ayouby, 2017) dampak eksternal dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Dampak eksternal positif adalah dampak yang dapat menguntungkan dari tindakan yang dilakukan. Sementara dampak eksternal negatif adalah apabila dampaknya bagi orang lain tidak menerima kompensasi.

Keterlibatan kiai dalam politik tentunya terdapat dampak yang ditimbulkan atas terjunnya kiai ke politik. Dalam (Setiawan E. , 2014) menjelaskan bahwa eksistensi kiai dalam masyarakat begitu mengakar. Hubungan kiai dengan politik dapat berdampak akan eksistensi seorang kiai dalam membangun kehidupan pesantren maupun masyarakat. Sebenarnya terdapat konsekuensi logis pada eksistensi kiai tersebut, yaitu apabila kiai dapat menjaga marwahnya dalam politik, kiai dapat menjadi lebih dekat dan dikenal oleh masyarakat, sebaliknya apabila kiai mendapatkan bumerang akan terkenalnya dalam politik, akan dapat menghancurkan citra kiai tersebut.

Memang jalan politik dapat menjadikan kiai lebih dikenal luas oleh masyarakat. Jalan tersebut didasari dengan niat tulus kiai untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Hal itu yang dapat menjadikan kiai menggunakan politik sebagai alat dakwahnya. Sesuai dengan Eko Setiawan menjelaskan bahwa salah satu alasan kiai berpolitik adalah alasan dakwah. Alasan tersebut yang merupakan usaha seorang kiai untuk menyebarkan nilai ke-Islam-an kepada masyarakat. Asumsi kiai bahwa melalui politik, maka media dakwah dapat menjadi luas dari sebelumnya (Setiawan E. , 2014).

Menurut Saidin Ernas dan Ferry Muhammadsyah Siregar (Siregar & Muhammadsyah, 2010) ada beberapa dampak yang ditimbulkan ketika kiai terjun langsung di dunia politik antara lain sebagai berikut:

a. Delegitimasi Peran Pesantren

Pesantren terlibat dalam politik praktis, implikasi yang dihadapi memang terkait kualitas pendidikan dalam pesantren tersebut. Kiai sebagai pengasuhnya yang terlampaui sibuk dengan urusan politik menyebabkan berkurangnya waktu untuk mengurus pesantrennya. Pesantren yang aktif untuk lebih mengurus politik ketimbang santrinya, mungkin dapat implikasi ditinggalkan oleh santrinya.

Independensi pesantren menjadi sebuah pertanyaan ketika orang tua santri dalam memilih pesantren. Independensi yang selama ini dikenal masyarakat terhadap pesantren yaitu menjaga nilai dan moralitas kepada masyarakat menjadi sulit ditegakkan. Ketika sudah masuk dalam lingkaran politik praktis, otomatis pesantren menjadi tunduk dan patuh kepada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan.

b. Kompensasi Ekonomi

Dalam teori ekonomi deterministik menjelaskan bahwa interaksi-interaksi dalam politik mengandung motif ekonomi. Hal tersebut terlihat ketika kiai dari suatu pesantren aktif di dunia politik, salah satu alasan yaitu untuk mendapatkan bantuan berupa materiil ekonomi untuk menunjang sarana fisik di pesantrennya.

Bantuan-bantuan yang datang ke pesantren merupakan hasil konsensus politik. Transaksi tersebut tidak diberikan secara mudah,

pasti ada timbal-balik dengan memberikan janji suara dalam kontestasi. Politik pesantren menjadi benar-benar digunakan untuk meningkatkan pembangunan di pesantren.

c. Resistensi Masyarakat terhadap Pesantren

Dalam masyarakat tradisional, kiai dan pesantren merupakan sumber legitimasi moral dan panutan untuk membimbing umat. Sebagai sumber kehidupan, kiai dan pesantren haruslah tampil sebagai *uswah hasanah*. Keterlibatan dalam politik tidak selamanya kotor, tetapi masyarakat secara umum sudah memandang politik sebagai persaingan merebut kekuasaan.

Resistensi masyarakat terhadap kiai dan pesantren terlibat dalam politik antara lain, *Pertama*, masyarakat menilai ketika pesantren dan kiai terlalu mengurus politik akan menjadi kultur pesantren tercerabut sebagai fungsinya mengadakan pendidikan agama Islam. *Kedua*, pembangkangan politik yang dilakukan masyarakat untuk tidak memilih partai yang didukung oleh suatu pesantren dan kiai. Hal ini terjadi karena pergeseran sikap politik kaum muslim dari tipe ideologis dan kharismatik ke pilihan yang rasional. Pendidikan demokratis yang semakin berkembang membuat masyarakat lebih mengetahui antara sikap pesantren sebagai contoh keagamaan yang patut dicontoh dan diteladani dengan sikap pesantren yang sarat dengan kepentingan politiknya tanpa ada kaitan dengan keagamaan.

2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

A. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Dalam negara demokrasi terdapat kontrak sosial warga negara ke pemerintah. Warga memberikan kepercayaan kepada negara untuk dipenuhi kebutuhan hak sipil warga negaranya. Kepercayaan itu diberikan atas kesepakatan bersama, maka perlu sebuah sistem yang dikenal dengan pemilihan umum (pemilu).

Menurut Mas'ood (1982: 26) dalam (Lestari, 2008) pemilu merupakan penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elite politik.

Dalam hierarki pemilu di Indonesia, tingkat provinsi sampai kabupaten/kota disebut dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara umum untuk memilih gubernur dan wakil gubernur ditingkat provinsi atau bupati dan wakil bupati kabupaten/kota serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Penyelenggaraan pemilu sejatinya bagian dari kehidupan negara Indonesia era reformasi. Pada prinsipnya pemilu merupakan sarana pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada pemimpin dengan harapan pemimpin yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat (Sutrisno, 2017).

Pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di tingkat provinsi untuk memilih gubernur biasa disebut Pemilihan Gubernur (Pilgub) merupakan bagian dari penyelenggaraan demokrasi. Gubernur adalah jabatan politik yang diamanahkan oleh rakyat untuk memimpin dan menggerakkan laju pemerintahan di provinsi.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil daerah, yang kemudian sering disebut pilkada merupakan instrumen bagian yang penting dari penyelenggaraan negara demokrasi, lebih khususnya pemerintahan daerah. Lewat pilkada inilah, masyarakat dapat menentukan untuk memilih pemimpinnya sebagai jalan memberikan aspirasi, yang kemudian bakal menentukan arah kebijakan masa depan suatu negara (Yusdianto, 2010).

Jabatan publik yang diemban menunjukkan bahwa pemimpin mengambil sebuah keputusan harus bersama dengan rakyat, dan memiliki dampak ke rakyat. Sementara jabatan politik mempunyai makna bahwa rekrutmen dilakukan secara politis, artinya melibatkan elemen-elemen politik dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkannya.

B. Dasar Hukum

Dalam hierarki konstitusi di Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 merupakan pusat kekuasaan dan tanggung jawab. Kemudian diturunkan ke Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan

sebagainya yang menjadi dasar hukum pemilihan gubernur sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

C. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah

Indonesia yang memakai sistem pemerintahan presidensiil memiliki konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan pusat. Dalam UUD

1945 pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa presiden sebagai penyelenggara pemerintah tertinggi memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan merealisasikan tujuan negara yang sudah ada dalam alinea IV UUD 1945. Pemerintah daerah yang bertugas sebagai membantu pemerintahan pusat, merupakan konsekuensi dari bentuk negara yang terbagi kedalam wilayah-wilayah besar atau kemudian disebut provinsi dan daerah kecil (kabupaten/kota) yang sudah termaktub dalam pasal 18 UUD 1945 (Wijayanti & Satriawan, 2009).

Dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah harus tetap berpegang teguh pada konsep otonomi daerah yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemetaan serta potensi dan keanekaragaman daerah
- b. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, pengawas maupun anggaran.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, juga antar daerah (Kumolo, 2015).

Dalam keputusan KPU provinsi Jawa Timur tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Bab II menjelaskan bahwa terdapat dua tahapan yaitu, tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan (2017).

Dalam tahapan persiapan sebagaimana yang dijelaskan terdiri dari beberapa program yaitu:

- a. Perencanaan program dan anggaran
- b. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah daerah
- c. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan pemilihan
- d. Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS
- e. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
- f. Pendaftaran pemantau Pemilihan
- g. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
dan
- h. Pemutakhiran data dan daftar pemilih

Sementara dalam tahap penyelenggaraan terdapat beberapa program yaitu sebagai berikut:

- a. Pencalonan, terdiri dari:
 - 1) Syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan

- 2) Pendaftaran Pasangan Calon
- b. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
- c. Masa kampanye:
 - 1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain
 - 2) Debat publik/ debat terbuka antar pasangan calon
 - 3) Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik
 - 4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye
- d. Laporan dan audit dana kampanye
- e. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara
- f. Pemungutan dan penghitungan suara
- g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara
- h. Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP)
- i. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)
- j. Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi
- k. Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih
- l. Evaluasi dan pelaporan tahapan (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, 2017).

3. Kiai

A. Pengertian Kiai

Istilah kiai sebenarnya dipakai oleh masyarakat Jawa untuk menyebut seseorang yang paham akan agama Islam. Terminologi kata kiai seperti ulama', ustadz, syeikh memiliki kesamaan arti dan peran sekaligus. Tetapi istilah kiai sudah meluas dalam komunitas umat islam di Indonesia. Secara etnografis kiai merupakan istilah lokal, terkhusus di Jawa, tapi secara terminologis, kiai sama dengan berbagai istilah yang menyebut orang yang pandai dalam agama Islam seperti buya, ajengan, dan sebagainya (Sadi, 2016).

Menurut Nurlatipah Natsir, kiai adalah salah satu sebutan masyarakat kepada seseorang yang dilegitimasi sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam terkait agama Islam. Maka sosok kiai sering menjadi sumber legitimasi tentang permasalahan agama, bahkan diluar aspek agama (Natsir, 2015).

Selain itu sosok kiai yang dilegitimasi sebagai figur yang mengetahui luas tentang agama Islam karena memiliki kharisma yang dimilikinya. Gelar kehormatan yang diberikan tersebut juga tidak lepas dari ketulusan dan keikhlasan sosok kiai dalam pekerjaannya.

Pandangan lain yang lebih komprehensif seperti yang dikemukakan Quraish Shihab dikutip dari A'la bahwa di Indonesia khususnya masyarakat Jawa menyebut peran ulama identik dengan sebutan kiai, yang mengemban tugas memberikan petunjuk dan

bimbingan keagamaan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi (Mahadi, 2015).

Jika ditinjau lebih mendalam pendapat Quraish Shihab, disitu terdapat peran penting kiai dalam menafsirkan nilai-nilai ajaran Islam dengan kehidupan sosial. Artinya kultus simbolik terkait ayat-ayat ajaran Islam dimanifestasikan dalam kehidupan masyarakat.

B. Tipologi Kiai

Berkembangnya suatu zaman, membuat peran seorang kiai menjadi lebih beragam pula. Di era sekarang, seorang kiai tidak hanya fokus sebagai pengasuh pesantren, pemimpin masyarakat Islam, maupun memberikan nasihat tentang agama Islam. Lebih dari itu kiai juga dapat berperan di ranah politik. Peran seorang kiai bakal tercapai apabila dapat berintegrasi dengan masyarakat dalam keadaan dan dimanapun berada, tidak terkecuali dalam ranah politik. Hal sedemikian rupa yang bakal mempermudah visi untuk mengajarkan nilai-nilai ke-Islam-an (Mubarrok)

Hal itu yang membuat terdapat tipologi kiai untuk mempermudah mengklasifikasikan sesuai dengan perannya. Amin Rais dan Haedar Nasir mengungkapkan terdapat tiga tipologi kiai, yaitu: *pertama*, kiai yang menguasai kitab kuning tapi wawasan dan ilmunya yang terbatas. Tipe kiai seperti ini menurutnya dalam kehidupan negara demokrasi tidak memberikan kontribusi yang tinggi. *Kedua*, kiai dengan

kemampuan penguasaan ilmu agama yang kuat, serta cakrawala pengetahuan yang luas dalam perkembangan zaman. Pada tipe ini menurutnya, kiai mempunyai sikap yang modernis serta dalam kehidupan demokrasi memberikan kontribusi yang positif. *Ketiga*, kiai yang terjun dalam dunia politik, sebenarnya kiai betipe ini terkadang menjadi penghambat perkembangan demokrasi (Kuntowijoyo & dkk, 1995).

Sementara, Endang Turmudi mengklasifikasikan kiai menjadi empat kategori, yaitu:

1. Kiai Pesantren

Kiai dalam tipe ini, mereka lebih fokus untuk memperhatikan kegiatan mengajar di pesantren. Dalam tipe ini, ini angat berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat melalui pendidikan di pesantren

2. Kiai Tarekat

Dalam tipe ini, seorang kiai memusatkan perhatiannya untuk membangun batin masyarakat melalui tarekat. Perlu diketahui bahwa arekat merupakan gerakan yang terbangun untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Gerakan tarekat ini merupakan gerakan informal, sedangkan pengikut kiai tarekat ini merupakan anggota formalm tarekat

3. Kiai Panggung

Kiai tipe ini di era sekarang yang banyak dijumpai, karena memang saat ini kiai banyak melakukan kegiatan dakwahnya. Tujuan dari kiai dakwah ini tidak lain adalah untuk menyebarkan dan mengembangkan ajaran agama Islam.

4. Kiai Politik

Kiai politik dapat diartikan sebagai kiai yang terjun dan fokus perhatiannya dalam dunia politik praktis. Disisi lain memang mereka sudah memiliki bekal agama Islam yang kuat, maka mereka terjun di politik sebagai dakwahnya dalam dunia demokrasi ini

4. Santri

A. Pengertian Santri

Secara umum santri adalah orang yang belajar ilmu agama Islam di pesantren sebagai tempat mencari ilmu (Hidayat, 2016). Santri juga sering disebut orang yang tinggal dan mengabdikan diri dalam lingkungan pesantren.

Sementara cendikiawan Islam Indonesia Nurcholish Madjid yang dikenal dengan Cak Nur berpendapat bahwa kata “santri” dapat ditinjau dari dua pandangan. *Pertama*, bahwa santri berasal dari bahasa sansekerta yaitu “sastri”, yang artinya melek huruf. Cak Nur melihat santri berdasarkan kaum santri kelas literaly yang belajar agama melalui kitab-kitab dengan bahasa Arab. *Kedua*, bahwa santri berasal dari

bahasa Jawa, “cantrik” yang artinya orang yang mengikuti seorang guru kemana perginya untuk menetap (Yasmadi, 2005).

Sementara Happy Susanto dan Muhammad Muzakki menjelaskan bahwa santri adalah orang yang mendalami ajaran agama Islam, orang yang fokus dengan ibadah sungguh-sungguh, serta kesalehan menjadi nilai tersendiri. Kata santri tersebut merupakan paduan dari dua kata yaitu, sant yang berarti manusia baik, dan kata tra yang artinya suka menolong. Maka santri juga dapat diartikan sebagai manusia yang baikserta suka menolong (Susanto & Muzakki, 2016).

Menurut Hasbi Indra dalam bukunya Pesantren dan Transformasi Sosial dalam (Susanto & Muzakki, 2016), santri adalah siswa atau mahasiswa yang melakukan pendidikan di sebuah pondok pesantren. Definisi dari Indra sedikit berbeda namun memiliki kesamaan bahwa belajar dalam sebuah pondok pesantren.

Hal itu memang kebanyakan santri rata-rata berumur belasan tahun antara dua belas sampai dengan dua puluh lima tahun. Tetapi sering juga dalam pesantren dijumpai beberapa yang masih di bawah umur 12 tahun maupun yang sudah tiga puluh lima tahun, meskipun kuantitasnya sangat sedikit. Semua itu dikarenakan memang menjadi seorang santri bukanlah sebagai penghidupan. (Geertz, 2005)

Menjadi seorang santri berarti orang yang belajar secara mendalam tentang agama Islam melalui pondok pesantren. Santri tidak lepas dari seorang guru, yang disebutnya kiai. Hubungan kiai-santri

merupakan hubungan guru-murid pada umumnya. Maka tidak diragukan lagi kalau santri selalu berperilaku *ta'dzim* terhadap kiainya.

B. Klasifikasi Santri

Fokus menjadi santri merupakan untuk memperdalam ajaran agama Islam. Dalam pesantren, seorang santri dididik untuk menjadi seorang ulama untuk masa depan sebagai perpanjangan tangan dakwah Islam di masyarakat. Model pengajaran yang sangat dikenal dalam pesantren adalah pengajaran kitab-kitab kuning (kitab Islam klasik), meskipun dalam perkembangannya sekarang banyak pesantren modern, tetapi kitab kuning masih tetap dipertahankan.

Jika dilihat memang perlu untuk fokus dalam belajar agama Islam, maka dalam pesantren terdapat kelompok santri, dapat dilihat pada dua klasifikasi sesuai dengan tradisi yang selama ini berkembang yaitu sebagai berikut:

- a. Santri mukim, yaitu santri yang belajar di sebuah pesantren dan menetap di pondok. Santri mukim biasanya mereka berasal dari daerah yang jauh dari pesantren. Biasanya santri mukim yang duah lama tinggal di pesantren memiliki tanggung jawab lebih untuk mengurus pesantren
- b. Santri kalong, yaitu santri yang belajar di pesantren tetapi selepas belajar akan pulang. Santri kalong biasanya orang-orang yang berasal tidak jauh dari pesantren, atau sering dari desa-desa di sekeliling pesantren tersebut (Dhofier, 2011).

5. Pondok Pesantren

A. Pengertian Pesantren

Dalam pandangan sejarah menunjukkan bahwa hadirnya pesantren di tengah negeri ini bersamaan dengan jalannya penyebaran Islam pada masa lampau yang dibawa oleh para wali waktu itu. Pada mulanya pesantren sebagai pusat penyebaran Islam yang terdapat hubungan sistem *zawiyali* di Timur Tengah dan India. Sistem *zawiyali* merupakan sistem pembelajaran dan transfer ilmu pengetahuan yang awalnya diselenggarakan di masjid besar pada diversifikasi aliran, yang pada selanjutnya mengkristal menjadi aliran pemikiran agama. Para wali itulah yang merintis untuk berdirinya pesantren sebagai model pendidikan tertua di Indonesia. Maka, oleh Tilaar pesantren yaitu sebagai bentuk pendidikan yang *indigenous* (Tilaar, 1998).

Nurcholish Madjid mengungkapkan bahwa pesantren merupakan bentuk pendidikan Islam yang ada di Indonesia, telah ada sejak beberapa abad yang lalu, yang mengandung makna ke-Islam-an serta keaslian (*indigenous*). Pesantren merupakan kata yang terdapat kandungan arti sebagai tempat para santri ataupun murid di sebuah pesantren (Madjid, 1997).

Sementara Zamakhsyari Dhofier menjelaskan bahwa pesantren adalah sebuah bentuk pendidikan Islam, yang mana siswa atau santrinya tinggal dalam suatu tempat dan belajar dibawah bimbingan gurunya yang sering disebut kiai (Dhofier, 2011).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pesantren adalah sebuah bentuk pendidikan Islam pertama di Indonesia yang sudah berlangsung selama berabad-abad silam, serta mempunyai keaslian (*indigenous*) dengan makna ke-Islam-an.

Selain itu Abdurrahman Wahid mengatakan pesantren sebagai latar belakang sebuah pendidikan yang dapat membentuk suatu pola pikir serta perilaku santrinya (Wahid M. , 1999).

Lembaga pesantren ini ada karena sebagai desakan masyarakat Islam akan perkembangan zaman, supaya kebutuhan tentang pendidikan agama Islam dapat terpenuhi. Lembaga pendidikan ini ada di tengah masyarakat meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Dalam berjalannya waktu, pesantren mampu memberikan investasi yang sangat bernilai dalam kehidupan masyarakat.

Pesantren memang berbeda dengan bentuk pendidikan umum yang lainnya. Perbedaan yang terlihat adalah dimana para santri atau murid tinggal dalam sebuah tempat tertentu bersama dengan kainya. Hal itu yang membuat ciri khas pesantren sebagai berikut:

- a. Terdapat hubungan santri dengan kiai yang akrab
- b. Taat dan patuh kepada kiai sebagai ciri khas santri
- c. Dapat hidup secara mandiri serta sederhana
- d. Semangat gotong royong yang tinggi, dalam cipta suasana yang penuh persaudaraan
- e. Santri menjadi terlatih unntuk hidup disiplin (Wahid M. , 1999)

Selain itu terdapat beberapa aspek yang dapat menjadikan ciri kehidupan dan pendidikan dalam pesantren, hal itu diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid, yaitu:

- a. Pemberian pengajaran dengan struktural, metode serta literatur tradisional. Artinya ketiga hal tersebut dapat dilakukan dengan pendidikan formal di sekolah ataupun madrasah dengan jenjang pendidikan yang bertingkat, ataupun dengan sistem *halaqah*, dan sorogan. Dalam pengajaran ini bertujuan untuk menekankan terkait pemahaman atas suatu kitab.
- b. Memelihara akan nilai tertentu, yang berguna untuk memudahkan. Tata nilai yang dimaksud yaitu menekankan pada nilai ibadah dalam setiap aktivitas atau kegiatan oleh para santri, di dalam itu termasuk untuk memuliakan guru sebagai sarana memperoleh ilmu pengetahuan yang hakiki (Wahid A. , 1997).

B. Tipologi Pesantren

Dalam perkembangannya, pesantren semakin maju pesat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sampai pada saat ini dapat dilihat berbagai macam tipe pesantren. Menurut Departmen Agama RI, tipe pondok pesantren dapat dilihat dari tiga kategori sebagai berikut:

1. Pesantren Salafiyah

Pondok pesantren salafiyah dikenal dengan model pembelajaran secara tradisional, sesuai dengan awal bagaimana

pesantren ini muncul. Pembelajaran dalam tipe pesantren ini dilakukan secara individu maupun kelompok dengan fokus pada kitab-kitab klasik (kitab kuning). Jenjang seorang santri berdasarkan pada seberapa banyak khatam (selesai) mempelajari kitab kuning. Untuk terkait kurikulum yang ada pada pesantren salafiyah semuanya tergantung pada kiai sebagai guru dan pengasuh pesantren.

2. Pesantren Khalafiyah

Pesantren khalaf merupakan model pesantren yang menggunakan model kegiatan pendidikan secara modern. Dalam pesantren ini terdapat pendidikan formal, seperti sekolah maupun madrasah sesuai jenjang pendidikan nasional.

3. Pesantren Campuran

Dalam model pesantren campuran, memang sebagian besar pesantren sering menamakan diri sebagai pesantren salafiyah atau khalafiyah. Tetapi pada kenyataannya, sekarang sebagian besar pesantren berada diantara dua pengertian pesantren tersebut. Pada pesantren tipe campuran ini didalamnya diterapkan pembelajaran kitab-kitab kuning dengan metode seperti halnya pesantren salafiyah (sorogan, bandongan, dan wetonan). Tetapi dilain sisi sistem pendidikan formal juga dikembangkan sesuai dengan kurikulum nasional (Tim Departemen Agama RI, 2003).

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah definisi dari konsep-konsep yang digunakan dan menjadi perhatian utama untuk penelitian, yang diartikan sebagai gambaran, untuk menghindari kesalah pahaman terkait pengertian dari konsep-konsep yang bakal digunakan dalam sebuah penelitian serta guna mengetahui batasan-batasan terkait istilah yang terdapat pada pokok bahasan. Maka batas bahasan pengertian konseptual yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah bentuk keterlibatan warga negara untuk mempengaruhi keputusan pemerintah supaya terciptanya iklim demokrasi yang seimbang (*check and balance*). Tujuan hal tersebut agar tidak adanya dominasi satu pihak. Partisipasi politik masyarakat tercipta karena terdapat tiga faktor yaitu:

1. Kondisi awal pemilih
2. Media Massa
3. Partai politik/kontestan

2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pilkada adalah salah satu instrumen dalam negara demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin dalam suatu daerah supaya masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya, yang kemudian dapat menentukan arah masa depan negara. Pilkada dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada, serta melalui dua tahapan yaitu, tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan

3. Kiai

Kiai adalah seseorang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat karena memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang agama Islam, yang kemudian ditransformasikan dalam kehidupan sosial untuk menyelesaikan permasalahan yang berkembang. Berdasarkan perkembangannya, kiai terbagi menjadi tiga tipologi yaitu:

- a. Kiai Pesantren
- b. Kiai Panggung
- c. Kiai Politik

4. Santri

Santri adalah seseorang yang belajar pada sebuah pesantren dan mengabdikan diri kepada kiai. Berdasarkan klasifikasinya, santri secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu *pertama*, santri mukim adalah santri yang tinggal dan belajar di pesantren bersama kiainya; *kedua*, santri kalong adalah santri yang belajar di pesantren tetapi tidak tinggal di pondok/asrama.

5. Pondok Pesantren

Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tertua, yang digunakan untuk mengajarkan agama Islam. Dalam pesantren mempunyai makna *indigenous* (keaslian) dengan semangat ke-Islam-an. Berdasar tipologinya, pondok pesantren secara garis besar terbagi menjadi tiga kategori yaitu:

- a. Pondok Pesantren Salafiyah (tradisional)

- b. Pondok Pesantren Khalafiyah (modern)
- c. Pondok Pesantren Campuran (perpaduan antara salafiyah dan khalafiyah)

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu bentuk usaha guna menjelaskan konsep-konsep yang masih berbentuk konstruk menjadi kata-kata yang dapat menggambarkan bentuk dan perilaku dari fokus penelitian yang dapat diuji kebenarannya dengan cara mengukur variabel yang digunakan. Lebih mudahnya definisi operasional adalah petunjuk pelaksanaan dalam suatu penelitian.

Definisi operasioanal yang dimaksudkan untuk memberi gambaran petunjuk pelaksanaan yang bakal digunakan dari perspektif santri terhadap keterlibatan kiai dalam pilgub Provinsi Jawa Timur tahun 2018, antara lain:

1. Dampak Positif dan Negatif Keterlibatan Kiai dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018
 - a. Kompensasi Ekonomi
 - b. Eksistensi Kiai
 - c. Media Dakwah
 - d. Resistensi Masyarakat Terhadap Kiai
 - e. Delegitimasi Kiai
 - f. Kiai Menjadi materialis

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi selanjutnya peneliti mendiskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif, artinya penulisan data dan fakta dihimpun dalam bentuk kata atau gambar (Setiawan A. A., 2018).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Darul ‘Ulum, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena pesantren ini sudah memiliki banyak kiai dalam sejarah masa lalu sampai sekarang yang terlibat aktif dalam dunia politik.

3. Sumber Data

a. Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh oleh peneliti di lapangan secara langsung dari analisa yang dijadikan obyek penelitian (Rahmawati, 2011). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara informan berdasarkan daftar pertanyaan yang disusun peneliti. Informan dalam hal ini adalah beberapa santri Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan secara tidak langsung yang mencatat fenomena tentang konsep penelitian atau yang berkaitan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang bakal dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi dua pihak yaitu antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi mendalam dari informan. Informan yang dipilih adalah santri laki-laki dan perempuan yang kuliah di Universitas Darul ‘Ulum dan Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum serta menetap di pondok pesantren Darul ‘Ulum dengan alasan memiliki pengetahuan dan dapat memberikan penjelasan yang obyektif.

Wawancara yang bakal dilakukan yaitu wawancara secara terstruktur, tetapi juga ada hal-hal pertanyaan intuisi yang terjadi saat wawancara. Jadi wawancara yang diharapkan akan memberikan informasi yang mendalam berdasarkan masalah yang diteliti.

b. Telaah Dokumen

Telaah dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah, peneliti menghimpun literatur-literatur terkait permasalahan yang diteliti seperti, buku-buku, agenda-agenda, foto-foto, dan berita-berita yang dianggap valid dengan permasalahan politik kiai.

Dokumen yang bakal dikumpulkan peneliti yaitu profil Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang dan data-data yang membahas tentang perspektif santri terhadap keterlibatan kiai dalam pilgub provinsi Jawa Timur tahun 2018 dengan studi kasus pondok pesantren Darul ‘Ulum Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.

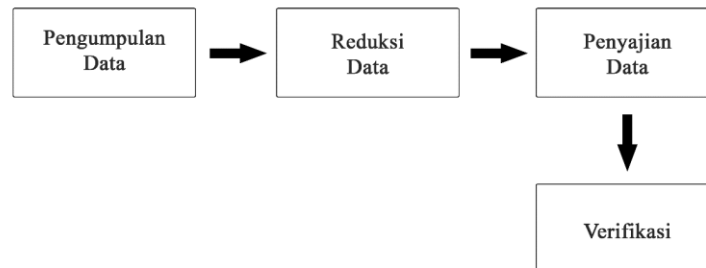
5. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan bagian dari proses peneliti untuk menafsirkan hasil yang ditelitinya. Tafsiran tersebut meliputi berbagai hal yang diperkirakan dari awal penelitian sampai hasil akhir setelah penelitian dilaksanakan. Langkah ini menjadi sangat penting karena memberikan arti terhadap data yang telah dikumpulkan.

Dalam penelitian ini, analisis data yang bakal dilakukan meliputi empat komponen yang berjalan bersamaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data
- b. Reduksi Data
- c. Penyajian Data
- d. Verifikasi

Keempat komponen analisis data tersebut merupakan siklus yang terus menerus dilakukan secara interaktif. Untuk memperjelas alur analisis data, dapat dijelaskan dalam bagan berikut.



Keterangan:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu data yang masih mentah yang diperoleh dari wawancara dan studi literatur

b. Reduksi data

Reduksi data adalah proses analisis data untuk mengelompokkan data-data yang diperoleh dan membuang data yang tidak diperlukan

c. Penyajian data

Data yang sudah diperoleh dalam penelitian serta sudah disusun memberikan informasi yang dapat membantu memahami peristiwa, kemudian dicari pola hubungan antara premis-premis data.

d. Verifikasi

Verifikasi adalah langkah terakhir dalam penelitian untuk memberikan makna data dengan sederhana dan logis yang dapat diperkirakan sebab akibat yang terjadi dalam suatu peristiwa.

